

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Rahmi (2011), meneliti tentang model penyajian laporan keuangan berbasis SAK ETAP pada perusahaan Karet Jawan Lestari Ampah (Kalimantan Tengah), hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut belum memenuhi karakteristik kualitatif karena laporannya tidak memiliki daya uji, tidak tepat waktu, dan tidak mempunyai daya banding. Dalam perhitungan tidak ada akumulasi aset tetap.

Susanto (2011) dalam penelitiannya menganalisa tentang penerapan standar akuntansi keuangan untuk entitas tanpa akuntabilitas publik (SAK ETAP) di UMKM Mojosoongo, Surakarta. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pembukuan yang dilakukan UMKM masih sebatas laporan bisnis yang berdasarkan kreatifitas sendiri dan belum menerapkan SAK ETAP, hal ini dikarenakan entitas belum mengenal SAK ETAP.

Kholmi (2011), mengkaji tentang “implementasi SAK ETAP untuk UMKM: Sebuah telaah kritis”. Keberadaan SAK ETAP dengan prinsip kesederhanaan dapat memberikan kemudahan UMKM dalam menyajikan laporan keuangan dibandingkan PSAK (besar) dengan ketentuan yang lebih kompleks dan bermanfaat untuk pengelolaan UMKM secara profesional. SAK ETAP menghadapi berbagai kendala dalam penerapannya, misalnya praktik akuntansi keuangan pada UMKM di Indonesia masih rendah. Penerapan SAK ETAP dibutuhkan sosialisasi di kalangan UMKM oleh pihak terkait dan berkepentingan.

Ariyanto, Stefanus dan Kartika Wijaya (2011) menerapkan SAK ETAP pada PT. Saptawira Adhitama Tour & Travel guna mengetahui perbedaan laporan keuangan yang telah sesuai dengan SAK ETAP dengan yang sebelumnya diterapkan di perusahaan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang dilakukan sekarang terletak pada objek penelitian, dalam hal ini peneliti menggunakan UD. Ripah Joyo Palawija Kediri untuk mendiskripsikan implemmentasi laporan keuangan berbasis SAK ETAP. Sehingga dapat dilihat ketika peneliti melakukan penelitian terhadap UD. Ripah Joyo Palawija Kediri sesuai atau belum memahami penyusunan laporan keuangan yang diatur dalam SAK ETAP.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pelaporan Keuangan

2.2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygant & Warfird (2007:2) laporan keuangan merupakan sarana pengkomunikasian informasi keuangan utama kepada pihak-pihak di luar perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi antara data keuangan dan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2001:7).

Menurut Harahap (2007 : 2), laporan keuangan adalah output dan hasil akhir dari proses akuntansi atau laporan keuangan inilah yang menjadi bahan informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan dalam proses

pengambilan keputusan. Disamping itu sebagai informasi bagi para pemakai, Laporan keuangan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atau accountability.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan adalah proses akuntansi yang digunakan sebagai media untuk berkomunikasi tentang informasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan kepada pemakainya sebagai salah satu bahan dalam pengambilan keputusan. Selain itu laporan keuangan juga berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen.

2.2.1.2 Tujuan Laporan Keuangan

Pada dasarnya tujuan laporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang digunakan sebagai sarana pengambilan keputusan oleh pemakainya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) (2007 :3) tujuan dari laporan keuangan adalah :

- a. Menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- b. Laporan keuangan yang disusun untuk tujuan ini adalah memenuhi kebutuhan bersama dari sebagian besar pengguna. Namun demikian laporan keuangan tidak menyediakan semua informasi yang mungkin dibutuhkan oleh pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena secara umum menggambarkan

pengaruh keuangan dari berbagai kejelasan dimasa yang lalu (historis), dan tidak diwajibkan untuk menyediakan informasi non-keuangan.

- c. Laporan keuangan juga telah menunjukkan apa yang telah dilakukan oleh manajemen atau merupakan pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pemakai yang ingin melakukan penilaian terhadap apa yang telah dilakukan atau pertanggungjawaban manajemen, melakukan hal ini agar mereka dapat membuat keputusan ekonomi. Keputusan ini mungkin saja mencakup keputusan untuk menanamkan atau menjual investasi mereka dalam suatu perusahaan atau keputusan untuk mengangkat kembali atau melakukan penggantian manajemen.

2.2.1.3 Jenis-jenis Laporan Keuangan

Menurut Kieso, Weygant & Warfield (2007 : 2) laporan keuangan yang lengkap terdiri dari komponen-komponen berikut ini :

1. Neraca (Balance Sheet)

Neraca menyediakan informasi mengenai sifat dan jumlah investasi dalam sumber daya perusahaan, kewajiban kepada kreditur, dan ekuitas pemilik dalam sumber daya bersih. Neraca dapat membantu meramalkan jumlah, waktu, dan ketidakpastian (Kieso, Weygant & Warfield, 2007 : 190).

2. Laporan Laba Rugi (Income Statement)

Laporan laba rugi menyediakan informasi yang diperlukan oleh para investor dan kreditur untuk membantu mereka memprediksikan jumlah, penetapan waktu, dan ketidakpastian dari arus kas masa depan (Kieso, Weygant & Warfield, 2007 : 140).

3. Laporan Arus Kas (Cash Flow Statement)

Tujuan laporan arus kas adalah menyediakan informasi yang relevan mengenai penerimaan dan pembayaran kas dari suatu perusahaan selama satu periode. Informasi tentang arus kas suatu perusahaan berguna bagi para pemakai laporan keuangan sebagai dasar untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan kas dan setara kas dan menilai kebutuhan perusahaan untuk menggunakan arus kas (Kieso, Weygant & Warfield, 2007:212).

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas merangkum perubahan-perubahan yang terjadi pada ekuitas pemilik selama suatu periode waktu tertentu (Kieso, Weygant & Kimmel, 2007 : 31).

5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Dalam PSAK Nomor 1 paragraf 70 menyatakan bahwa catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian jumlah yang tertera dalam neraca, laporan rugi laba, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas serta informasi tambahan seperti kewajiban kontijensi dan komitmen. Catatan atas laporan keuangan juga mencakup informasi yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan serta pengungkapan-pengungkapan lain yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

2.2.1.4 Karakteristik Kualitas Laporan Keuangan

Karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi penggunaannya. Karakteristik kualitatif pokok ada 4 (empat), yaitu :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang disajikan dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pengguna. Untuk maksud ini, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.2).

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna dengan cara membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.3).

3. Keandalan

Informasi memiliki kualitas andal, jika bebas dari kesalahan material dan bias, dan penyajian secara jujur apa yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Laporan keuangan tidak bebas dari bias (melalui pemilihan atau penyajian informasi) jika dimaksudkan untuk

mempengaruhi pembuatan suatu keputusan atau kebijakan untuk tujuan mencapai suatu hasil tertentu (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.5).

4. Dapat Dibandingkan

Laporan keuangan suatu perusahaan dalam satu periode tertentu harus dapat dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Laporan keuangan juga harus dapat dibandingkan dengan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan secara relatif (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.6).

2.2.1.5 Pengakuan Unsur Laporan Keuangan

1. Pengakuan aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.34).

2. Pengakuan kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.35).

3. Pengakuan penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.36).

4. Pengakuan beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.37).

2.2.1.6 Pengukuran Unsur Laporan Keuangan

Dasar pengukuran yang umum adalah biaya historis dan nilai wajar :

1. Biaya historis. Aset adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar dari pembayaran yang diberikan untuk memperoleh aset pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar kas atau setara kas yang , atau diterima atau sebesar nilai wajar dari aset non-kas yang diterima sebagai penukar dari kewajiban pada saat terjadinya kewajiban.
2. Nilai wajar adalah jumlah yang dipakai untuk mempertukarkan suatu aset, atau untuk menyelesaikan suatu kewajiban, antara pihak-pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai dalam suatu transaksi dengan wajar.

2.2.2 Standar Akuntansi Keuangan

2.2.2.1 Pengertian Standar akuntansi Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah sebuah kerangka yang dilakukan di dalam sebuah langkah untuk membuat laporan keuangan dengan tujuan tercipta keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Indonesia diperoleh berdasarkan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984.

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia adalah terapan dari beberapa standard akuntansi yang sudah baku, seperti IAS, IFRS, ETAP, GAAP. Standar Akuntansi keuangan juga bertujuan membuat sistem penyusunan laporan keuangan menjadi lebih mudah. Di Indonesia, Standar Akuntansi Keuangan yang diterapkan berdasarkan IFRS, pada tahun 2012.

Pada PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan Standar Akuntansi Pemerintah oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

2.2.2.2 Macam-macam Standar Akuntansi

Standar akuntansi yang berlaku di Indonesia terdiri atas empat standar, sering disebut sebagai 4 pilar Standar Akuntansi. Menurut Dwi Martani, dkk. (2012:16) macam-macam standar akuntansi yang berlaku di Indonesia adalah:

1. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) digunakan untuk entitas yang memiliki akuntabilitas publik yaitu entitas terdaftar atau dalam proses pendaftaran dipasar modal atau entitas fidusia (yang menggunakan dana masyarakat seperti asuransi, perbankan, dan dana pensiun). Standar ini mengadopsi IFRS mengingat Indonesia, melalui IAI, telah menetapkan untuk melakukan adopsi penuh IFRS mulai tahun 2012.

IFRS sebagai standar internasional memiliki tiga ciri utama sebagai berikut:

- a. Principles-Based.

Standar yang menggunakan Principles-Based hanya mengatur hal-hal yang pokok dalam standar sedangkan prosedur dan kebijakan detail diserahkan kepada pemakai. Sedangkan standar yang rule based, memuat ketentuan pengakuan akuntansi secara detail.

- b. Nilai Wajar. Standar akuntansi banyak menggunakan konsep nilai wajar (fair value). Penggunaan nilai wajar untuk meningkatkan relevansi informasi akuntansi untuk mengambil keputusan.

- c. Pengungkapan. Mengharuskan lebih banyak pengungkapan (disclosure) dalam laporan keuangan. Pengungkapan diperlukan agar pengguna laporan keuangan dapat mempertimbangkan informasi yang relevan dan perlu diketahui terkait dengan apa yang dicantumkan dalam laporan keuangan dan kejadian penting yang terkait dengan item tersebut.

2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas (SAK ETAP), yaitu digunakan untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas signifikan

dalam menyusun laporan keuangan tujuan umum (*general purpose financial statement*).

3. Standar Akuntansi Syariah (SAK Syariah), yaitu standar yang digunakan untuk entitas yang memiliki transaksi syariah atau entitas berbasis syariah. Standar akuntansi syariah terdiri atas kerangka konseptual penyusunan dan pengungkapan laporan, standar penyajian laporan keuangan, dan standar khusus transaksi syariah seperti mudharabah, salam, ijarah, dan istishna.
4. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), yaitu standar akuntansi yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah.

2.2.3 SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik)

SAK ETAP (Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) adalah suatu prinsip, prosedur, metode, atau aturan penyusunan laporan keuangan pada entitas tanpa akuntabilitas publik (ETAP) yaitu entitas usaha yang tidak tercatat di pasar dan entitas ini bukan lembaga keuangan.

Entitas yang usaha yang dimaksud disini adalah untuk unit usaha ekonomi berskala kecil dan menengah (UKM) (Musanandar, 2011). Menurut Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) Bab 1 tahun 2009, entitas tanpa akuntabilitas adalah entitas yaitu:

1. Tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan; dan
2. Menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum (*general purpose financial statement*) bagi pengguna eksternal. Contoh pengguna eksternal adalah

pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit.

Entitas memiliki akuntabilitas publik signifikan jika:

- a. Entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran, atau dalam proses pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal; atau
- b. Entitas menguasai aset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat, seperti bank, entitas asuransi, pialang atau pedagang efek, dana pensiun, reksa dana, dan bank investasi.

Entitas yang memiliki akuntabilitas publik signifikan dapat menggunakan SAK ETAP jika otoritas berwenang membuat regulasi mengizinkan penggunaan SAK ETAP. Tujuan laporan keuangan ETAP adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas entitas, serta bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi pada siapapun yang tidak dalam posisi dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu. Dalam memenuhi tujuan laporan keuangan juga menunjukkan apa yang harus dilakukan manajemen (stewardship) atau pertanggungjawaban manajemen atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. (SAK ETAP hal 1-2).

2.2.3.1 Pengakuan Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Pengakuan unsur laporan keuangan merupakan proses pembentukan suatu pos dalam neraca atau laporan laba rugi yang memenuhi definisi suatu unsur dan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Ada kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang terkait dengan pos tersebut akan mengalir dari atau ke dalam entitas.
2. Pos tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Dalam hal ini ada beberapa hal yang diatur dalam SAK ETAP dalam pengakuan, diantaranya:

1. Pengakuan Aset

Aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Aset tidak diakui dalam neraca jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin mengalir ke dalam entitas setelah periode pelaporan berjalan. Sebagai alternatif transaksi tersebut menimbulkan pengakuan beban dalam laporan laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.34).

2. Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui dalam neraca jika kemungkinan pengeluaran sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban masa kini dan jumlah yang harus diselesaikan dapat diukur dengan andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.35).

3. Pengakuan Penghasilan

Pengakuan penghasilan merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Penghasilan diakui dalam laporan laba rugi jika kenaikan manfaat ekonomi di masa depan yang berkaitan dengan peningkatan aset atau

penurunan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.36).

4. Pengakuan Beban

Pengakuan beban merupakan akibat langsung dari pengakuan aset dan kewajiban. Beban diakui dalam laporan laba rugi jika penurunan manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan penurunan aset atau peningkatan kewajiban telah terjadi dan dapat diukur secara andal (Ikatan Akuntan Indonesia, 2009a:2.37).

SAK ETAP tidak mengizinkan pengakuan pos-pos dalam neraca yang tidak memenuhi definisi aset atau kewajiban dengan mengabaikan apakah pos-pos tersebut merupakan hasil dari penerapan “ Matching concept”. (SAK ETAP Hal-9)

2.2.3.2 Penyajian Laporan Keuangan

a. Penyajian Wajar

- 1) Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa dan kondisi lain yang sesuai dengan kriteria pengakuan aset dan kewajiban, penghasilan beban.
- 2) Penerapan SAK ETAP dengan mengungkapkan tambahan jika diperlukan menghasilkan laporan keuangan yang wajar atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas.
- 3) Pengungkapan tambahan diperlukan ketika kepatuhan atas prasyarat tertentu dalam SAK ETAP tidak memadai bagi pemakai untuk memahami

pengaruh dari transaksi tertentu, peristiwa dan kondisi lain atas posisi keuangan dan kinerja keuangan.

b. Kepatuhan Terhadap SAK ETAP

Entitas yang laporan keuangan patuh dengan SAK ETAP harus membuat suatu persyaratan eksplisit dan secara penuh atas kepatuhan tersebut dalam catatan entitas atas laporan keuangan. Laporan keuangan tidak boleh menyatakan mematuhi SAK ETAP kecuali jika mematuhi semua persyaratan dalam SAK ETAP.

c. Kelangsungan Usaha

- 1) Entitas memiliki kelangsuhan usaha, kecuali jika manajemen bermaksud melikuidasi entitas atau menghentikan operasi dan tidak mempunyai alternative realistis kecuali melakukan hal tersebut.
- 2) Pada saat menyusun laporan keuangan, manajemen harus membuat penilaian atas kemampuan entitas melanjutkan kelangsungan usaha.
- 3) Dalam membuat penilaian kelangsungan usaha, jika manajemen menyadari terdapat ketidakpastian yang material terkait dengan peristiwa atau kondisi yang mengakibatkan keraguan signifikan terhadap kemampuan entitas untuk melanjutkan usaha maka entitas harus mengungkapkan ketidakpastian pada dasar penyusunan laporan keuangan dan alasan mengapa entitas tidak dianggap mempunyai kelangsungan usaha.

d. Frekuensi Pelaporan

- 1) Entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan (termasuk informasi komparatif) minimum satu tahun sekali.
- 2) Jika laporan keuangan tahunan disajikan lebih pendek atau lebih panjang dari satu tahun, maka harus mengungkapkan:
 - a) Fakta tersebut
 - b) Alasan penggunaan untuk periode lebih panjang atau pendek
 - c) Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan keuangan yang terkait adalah tidak dapat seluruhnya diperbandingkan.

e. Konsistensi Penyajian

- 1) Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan harus konsisten, kecuali:
 - a) Terdapat perubahan signifikan pada sifat dari operasi entitas atau peninjauan penyajian dan menemukan penyajian atau klasifikasi lain lebih sesuai.
 - b) SAK ETAP mensyaratkan suatu perubahan penyajian.
- 2) Jika penyajian atau pengklasifikasian pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka entitas harus mereklasifikasi jumlah komparatif jika reklasifikasi tidak praktis. Entitas harus mengungkapkan hal-hal berikut:
 - a) Sifat reklasifikasi
 - b) Jumlah setiap pos dari pos yang direklasifikasi.
 - c) Alasan reklasifikasi

3) jika reklasifikasi jumlah komparatif tidak praktis, maka entitas harus mengungkapkan:

- a) Alasan reklasifikasi jumlah komparatif tidak dilakukan
- b) Sifat penyesuaian yang telah dibuat jika jumlah komparatif direklasifikasi.

f. Materialitas dan Agresi

Pos yang material disajikan terpisah, sedangkan tidak material digabungkan dengan jumlah yang memiliki sifat atau fungsi sejenis. Kelalaian dalam mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat suatu pos dianggap material jika, baik secara individu maupun bersama-sama dapat mempengaruhi pengambilan keputusan pengguna laporan keuangan. (SAK ETAP Hal 14).

2.2.3.3 Laporan Keuangan Lengkap

Dalam laporan keuangan entitas terdiri dari berbagai jenis meliputi:

- a. Neraca
- b. Laporan laba rugi
- c. Laporan perubahan ekuitas yang menunjukkan seluruh perubahan ekuitas selain perubahan yang timbul dari transaksi dengan pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
- d. Laporan arus kas
- e. Catatan atas laporan keuangan yang berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Dalam SAK ETAP, jika entitas hanya mengalami perubahan ekuitas yang muncul dari laba atau rugi, pembayaran deviden, koreksi kesalahan periode lalu,

dan perubahan kebijakan akuntansi selama periode laporan keuangan disajikan maka entitas dapat menyajikan laporan laba rugi dan saldo laba sebagai pengganti laporan laba rugi dan laporan perubahan ekuitas. (SAK ETAP Hal 17).

2.2.3.4 Identifikasi Laporan Keuangan

Entitas harus mengidentifikasi secara jelas setiap komponen laporan keuangan informasi. Berikut di sajikan dan diulangi bilamana perlu pada setiap halaman laporan keuangan yaitu :

- a. Nama entitas pelapor dan perubahan dalam nama tersebut sejak laporan periode berakhir
- b. Tanggal atau periode yang dicakup oleh laporan keuangan
- c. Mata uang pelaporan
- d. Pembulatan angka yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan

Entitas harus mengungkapkan hal berikut ini dala catatan atas laporan keuangan antara lain :

- a. Domisili dan bentuk hukum entitas serta alamat kantor yang terdaftar
- b. Penjelasan sifat dan aktivitas utamanya. (SAK ETAP Hal 18)